



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/Kep.415-Hukham/2025 TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
188.54/Kep.25-Hukham/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk tahun 2025, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.254-Hukham/2025;
 - bahwa untuk mengakomodasikan kebutuhan regulasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan kelima atas Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C41126FDA3>

C41126FDA3

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.254-Hukham/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/KEP.25-HUKHAM/2025 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025.


KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.254-Hukham/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.25-Hukham/2025 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2025 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C41126FDA3>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 188.54/Kep.415-Hukham/2025
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA BARAT NOMOR 188.54/Kep.25-Hukham/2025
TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2025

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
1.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
2.	Pengangkatan Anak	
3.	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	
4.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Provinsi Jawa Barat	
5.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (<i>Medical Staff By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru	
7.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat	
8.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat	
9.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat	



C41126FDA3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C41126FDA3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa	
10.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat		
11.	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
12.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
13.	Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		
14.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
15.	Peta Jalan dan Rencana Aksi Daerah Upaya Kesehatan Penglihatan Provinsi Jawa Barat		
16.	Pedoman Pembentukan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur		Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
17.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
18.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia		
19.	Pedoman Penyusunan Rencana Pelayanan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan		
20.	Penyelenggaraan Kemitraan Kepemudaan		
21.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa		
22.	Instrumen Evaluasi Kapasitas Pemerintahan Daerah		
23.	Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja sama Daerah		



C41126FDA3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C41126FDA3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
24.	Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa	
25.	Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Manajer Bagi Putra Daerah Di Provinsi Jawa Barat	
26.	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2030	
27.	Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Barat	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
28.	Peraturan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
29.	Pendidikan Karakter Gapura Pancawaluya Jawa Barat Istimewa	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
30.	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	
31.	Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka	
32.	Peningkatan Aksesibilitas Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
33.	Tata Cara Usulan, Penilaian, Penetapan, dan Pencabutan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
34.	Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah	
35.	Pedoman Kerja Sama dan Pembentukan Unit Usaha pada Badan Layanan Umum Daerah	
36.	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat	
37.	Pengarusutamaan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
38.	Pusat Kesejahteraan Sosial/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
39.	Pengelolaan Barang Persediaan untuk Penanganan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
40.	Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas	
41.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	
42.	Rencana Aksi Daerah Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat	
43.	Badan Pengelolaan Cekungan Bandung	
44.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
45.	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah	
46.	Penyelenggaraan Penanganan Infrastruktur dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
47.	Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat	
48.	Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
49.	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	
50.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
51.	Penyediaan Rumah Layak Huni	
52.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
53.	Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat	
54.	Peningkatan Pembangunan Jalan di Daerah Provinsi Jawa Barat	
55.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
56.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Barat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
57.	Pengawasan dan Pengendalian Penerapan Tarif Penyedia Layanan Angkutan yang Bermitra dengan Penyedia Layanan Aplikasi	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
58.	Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
59.	Subsidi Bunga Kredit dan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Kecil di Daerah Provinsi Jawa Barat	
60.	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	
61.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya Perkebunan, Penyuluh Swasta Perkebunan, Fasilitator Daerah Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
62.	Pengembangan Usaha Kopi Tahun 2023-2027	
63.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
64.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
65.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	
66.	Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Perlindungan Produksi Tembakau bagi Petani Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
67.	Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	
68.	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
69.	Tata Cara Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah	
70.	Penyediaan Tenaga Listrik di Desa/Kelurahan	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
71.	Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
72.	Fasilitasi Asuransi Pertanian	
73.	Pembenihan Kentang Berkualitas di Jawa Barat	
74.	Kemitraan Pengelolaan Lahan antara Pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Petani Penggarap	
75.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	
76.	Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
77.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Daerah	
78.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
79.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
80.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Padi dan Palawija	
81.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
82.	Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
83.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	
84.	Masyarakat Hukum Adat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
85.	Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen di Jawa Barat	
86.	Percepatan Penuntasan Pengelolaan Persampahan	
87.	Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
88.	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pelaksanaan Pengadaan Pra-Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Asisten Administrasi Umum		
89.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
90.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
91.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	
92.	Transformasi Digital	
93.	Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
94.	Pengelolaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
95.	Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
96.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	
97.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	



C41126FDA3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C41126FDA3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
98.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
99.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
100.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
101.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
102.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
103.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
104.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
105.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
106.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
107.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
108.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
109.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
110.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
111.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
112.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
113.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
114.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
115.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
116.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
117.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
118.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
119.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
120.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
121.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
122.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
123.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
124.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
125.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
126.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
127.	Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030	
128.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
129.	Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
130.	Tata Hubungan kerja/ Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
131.	Hari Kerja dan Jam Kerja	
132.	Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

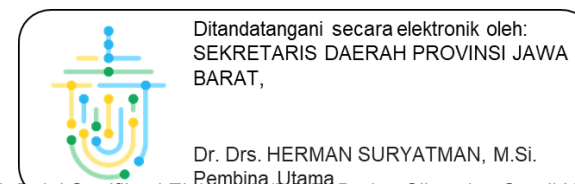


No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
133.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
134.	Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
135.	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	
136.	Perubahan Formulasi Bobot Penilaian Kinerja Jabatan Guru pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	
137.	Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi pada Jawa Barat <i>Corporate University</i>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
138.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
139.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
140.	Penilaian Barang Milik Daerah	
141.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
142.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
143.	Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
144.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
145.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
	Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
146.	Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
147.	Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
148.	Tata Cara Pemberian Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
149.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025	
150.	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
151.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
152.	Rencana Induk dan Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
153.	Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	
154.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi Daerah	

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C41126FDA3>

